

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah singkat Pemerintah Kota Banjarmasin**

Sejarah Pemerintah Kota Banjarmasin diawali dengan Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Selatan diperkirakan dimulai ketika berdiri Kerajaan Tanjung Puri sekitar abad 5-6 Masehi yang terletak di kaki pegunungan Meratus dan di tepi sungai besar sehingga di kemudian hari menjadi bandar yang cukup maju. Kerajaan Tanjung Puri bisa juga disebut kerajaan Kahuripan, yang cukup dikenal sebagai tempat pertama kalinya percampuran antar suku dengan segala komponennya.

Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV di Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa. Dengan ditandatanganinya perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan pemimpin ALRI IV mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai wilayah Indonesia, melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan

Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda.

Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalami penataan. Di wilayah Kalimantan, penataan antara lain berupa pemecahan daerah Kalimantan menjadi 3 provinsi masing-masing Kalimantan Barat, Timur dan Selatan yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956. Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957. Sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dan daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah dan tetap seperti adanya. Adapun UU No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1957 dan UU No.27 Tahun 1959 yang menjadi dasar terbentuknya Kotamadya Banjarmasin.

## **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis ini berada di Jalan RE Martadinata No. 1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banajarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70001.

## **c. Visi dan Misi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin**

### **1) Visi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin**

- a) Mewujudkan informasi dan komunikasi berkesinambungan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan masyarakat.

### **2) Misi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin**

- a) Terciptanya hubungan kerja antar instansi dan antar Pemerintah dengan masyarakat secara interaktif dan sejajar.
- b) Terciptanya aparatur yang profesionalisme melalui diklat teknis.
- c) Terciptanya iklim keterbukaan dengan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang lancar dan sehat, kontrol sosial semakin baik, meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

## **d. Tugas Pokok dan Fungsi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin**

- 1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik,

teknologi informasi dan komunikasi, layanan *e-Government* serta statistik dan persandian.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- c) Merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- d) Merumuskan dan menetapkan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan dinas;
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
- f) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi, dan mengordinasikan kegiatan pengelolaan komunikasi publik;

- g) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
- h) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan layanan *e-Government*.
- i) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan statistik dan persandian.
- j) Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Fungsi bagian humas Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu:

- a) Penyebarluasan informasi/kebijakan Pemerintah Kota melalui media cetak dan elektronik.
- b) Peliputan dan publikasi.
- c) Pembuatan naskah video.
- d) Pemuatan layanan pengaduan masyarakat/humas menyapa.
- e) Pengelolaan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

**e. Struktur Organisasi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin**

Walikota (Per 25 April Tahun 2022)

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sub bagian perencanaan
- 3) Sub bagian keuangan
- 4) Sub bagian umum dan kepegawaian
- 5) Bidang pengelolaan komunikasi publik
- 6) Bidang teknologi informasi dan komunikasi
- 7) Bidang layanan *e-Government*
- 8) Bidang statistik dan pengelolaan informasi publik
- 9) Seksi layanan informasi publik
- 10) Seksi infrastruktur dan teknologi
- 11) Seksi pengembangan aplikasi
- 12) Seksi statistik dan pengelolaan informasi publik
- 13) Seksi kemitraan komunikasi publik
- 14) Seksi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
- 15) Seksi pengembangan layanan *e-Government*
- 16) Seksi media publik

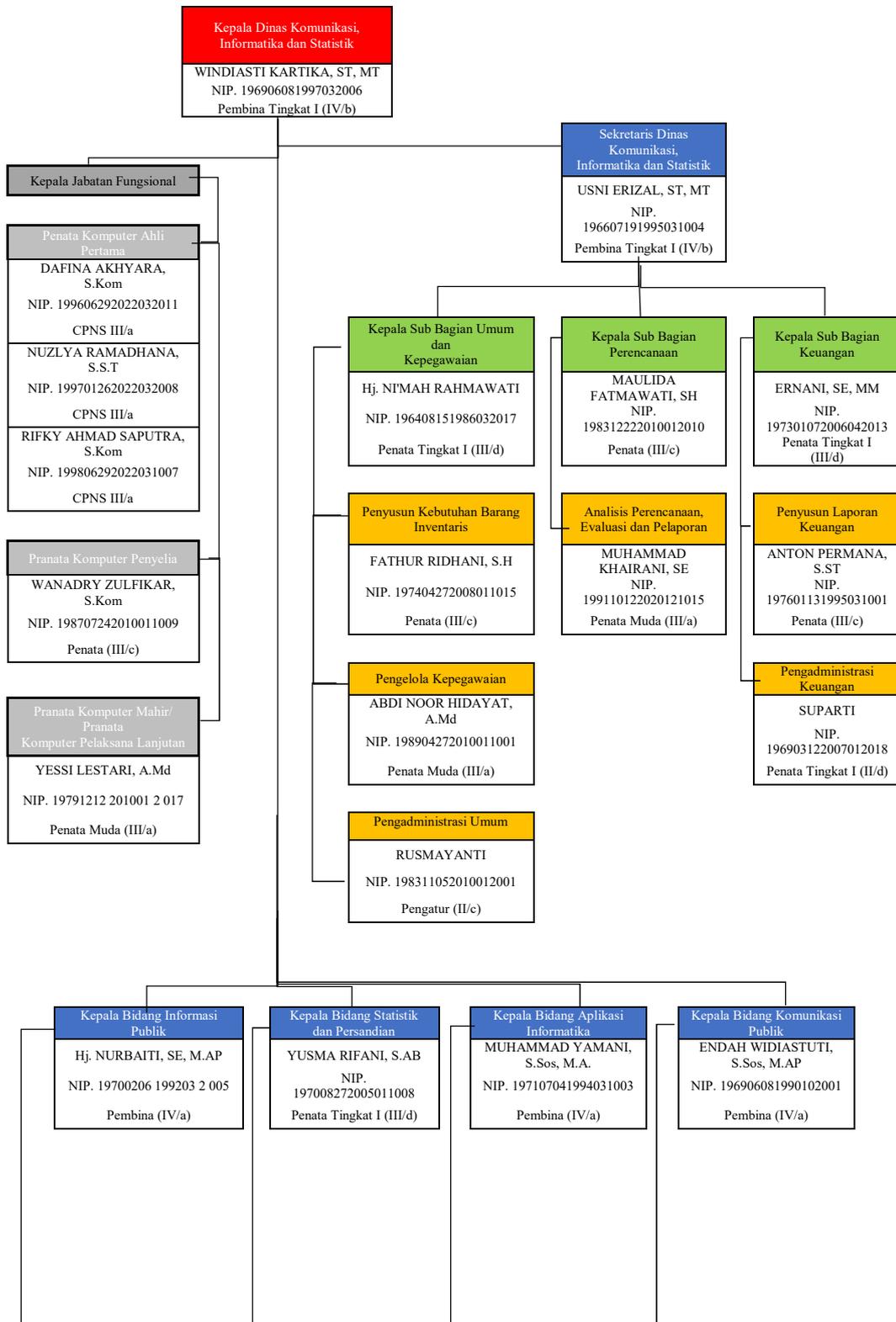
17) Seksi Kehumasan

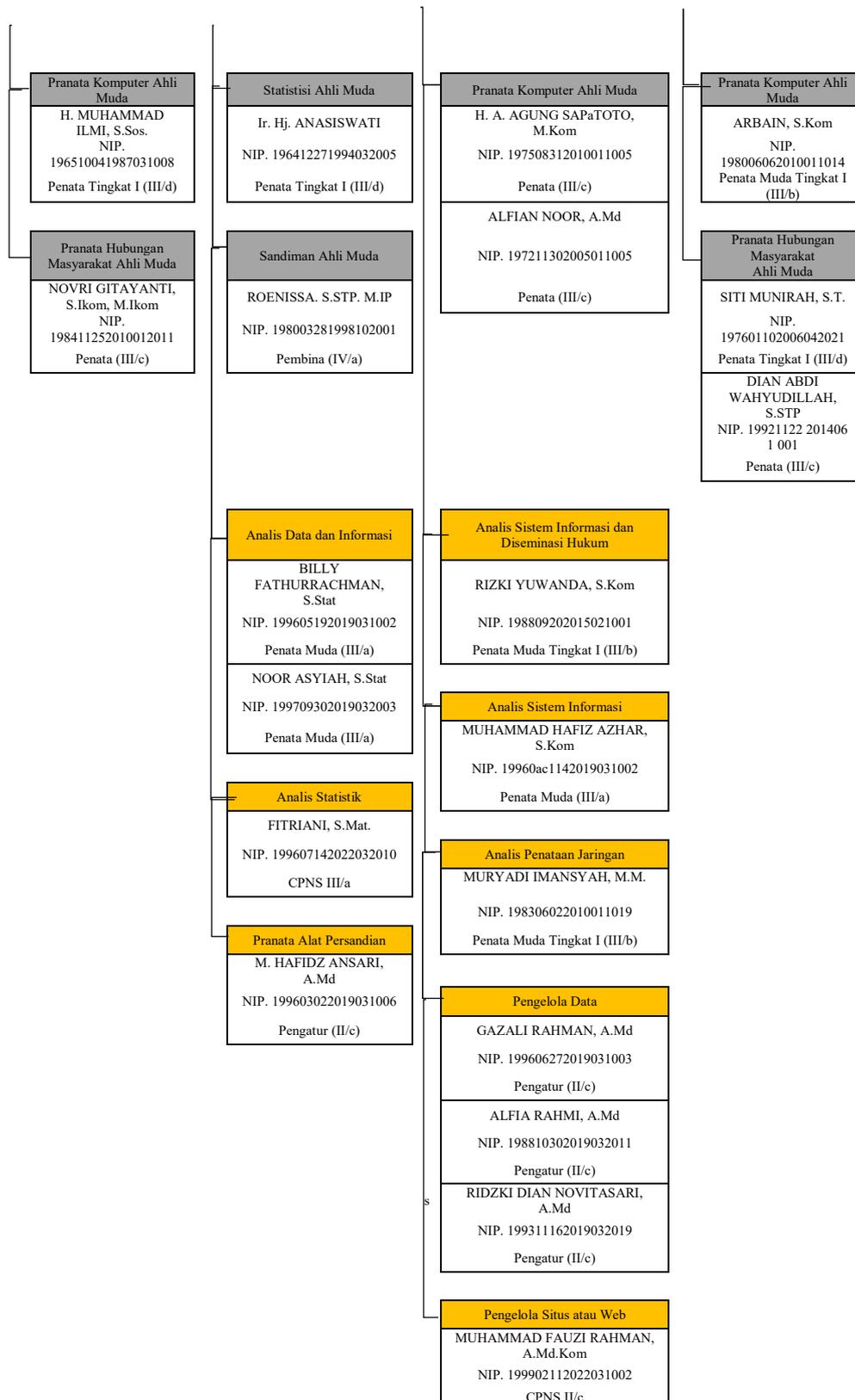
18) Seksi persandian dan keamanan informasi

19) Seksi tata kelola *e-Government*

20) Seksi pengelolaan opini publik

**Tabel 4.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin Per 25 April Tahun 2022**





Sumber: [diskominfotik.banjarmasukota.go.id](http://diskominfotik.banjarmasukota.go.id)

## **f. Kondisi Pemerintah Kota Banjarmasin**

### **1) Kondisi Bangunan Pemerintah Kota Banjarmasin**

Dulu, Gedung Balai Kota Banjarmasin bukanlah yang berada di Jalan RE Martadinata. Di tahun 1938 hingga 1941 pemerintahan di Kota Banjarmasin pernah menempati sebuah gedung di kawasan Jalan Heerengracht atau jalan-jalan Jawa dan Jalan di Panjaitan sekarang. Sejarawan di Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur, menjelaskan dahulu Kantor yang ditempati di kawasan jalan tersebut dikenal Nama 'Haminta'. Atau dikenal juga dengan Nama Balai Kotapraja Banjarmasin.

Kondisi berbeda terjadi setelah masuknya tentara Jepang tahun 1942-1945. Kantor pemerintahan dipindahkan ke sebuah toko bernama Jerman Neuffer & Co, yang hingga kini belum diketahui di mana lokasinya. Seiring berjalannya waktu, dituturkan Mansyur, mengutip catatan Ramli Nawawi (1986), setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 Kotapraja Banjarmasin dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), masalah pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3/1953. Isinya, tentang pembentukan Kota Besar Banjarmasin, dengan disertai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, tugas pembantuan.

Hingga akhirnya, di tahun 1960, gedung pemerintahan pun diubah namanya menjadi Wisma Catur Sakti, dengan perombakan pada bagian atap, bermodel rumah hubungan tinggi. "Lalu, di perkirakan

pada tahun 1965 Kantor Wali Kota Banjarmasin pindah dan menempati gedung di Jalan Lambung Mangkurat. Yakni, Kantor DPRD Kota Banjarmasin sekarang. Tidak habis sampai di situ, Wali Kota Banjarmasin kembali menempati gedung yang baru. Tepatnya, pada saat orde baru (1966-1998), di sekitar tahun 1978-1980. Yakni, di kawasan Jalan RE Martadinata. Jauh sebelum itu, menurut Mansyur, lokasi yang ditempati Wali Kota Banjarmasin beserta jajarannya itu, merupakan bekas pangkalan Angkatan Laut Jepang. “Itu terjadi saat era kependudukan Jepang.” Ungkapnya.

Kemudian, saat kemerdekaan, lokasi itu dikenal pula dengan sebutan Komando Daerah Maritim (Kodamar) atau Kodapel di masa awal kemerdekaan. “Jadi, diperkirakan mulai ditempati sebagai kantor Wali Kota Banjarmasin sejak tahun 1978,”tuturnya. “karena di tahun itu, terdapat penyerahan tanah dari Menhankan Pangab melalui SKEP Menhankam Pangab, Nomor: SKEP/1533/XI/78, tanggal 16 Nopember 1978 tentang Penyerahan Tanah/Bangunan Eks. Kantor Kodamar 6 di Banjarmasin,” jelasnya. Hal itu menurut Mansyur, cukup relevan dengan kondisi pada tahun 1982-1983 yang menurut catatan Idwar Saleh, diperkirakan lokasi Kantor Balai Kota Banjarmasin sudah menempati eks Kantor Kodamar 6 di Banjarmasin.

## 2) Sarana dan Prasarana Humas Pemerintah Kota Banjarmasin

Adapun fasilitas atau Sarana dan Prasarana yang dimiliki Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan strategi humas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Fasilitas Ruangan di Humas Pemerintah Kota Banjarmasin

No.	Jenis Ruangan	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Kantor	1	Baik
2.	Kantin	1	Baik
3.	Wc	1	Baik
4.	Tempat Wudhu	1	Baik
5.	Musholla	1	Baik
6.	Parkiran	3	Baik
7.	Laptop	12	Baik
8.	Dispenser	1	Baik
9.	Note Book	5	Baik
10.	Ac	3	Baik
11.	Kursi Tamu	4	Baik
12.	Layar Film/Projector	1	Baik
13.	Televisi	3	Baik
14.	Mesin Absensi	1	Baik

## 3) Penyajian Data

Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis dapatkan mengenai rumusan masalah yang ditanyakan dalam skripsi ini melalui metode teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Maka hal selanjutnya yang penulis lakukan adalah menyajikan data dalam bentuk penjelasan.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dan dokumentasi maka penulis dapat menyajikan data dalam penjelasan adalah sebagai berikut:

**a) Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra  
Pemerintah Kota Banjarmasin**

Humas membutuhkan strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan citra Pemerintah Kota Banjarmasin. Strategi komunikasi yang digunakan antara lain:

**(1) Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan  
citra**

Strategi komunikasi yang humas Pemerintah Kota Banjarmasin gunakan bukan hanya sebatas melakukan pelayanan publik atau menggunakan media cetak maupun elektronik untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Tetapi humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengadakan bamara. Bamara diambil dari Bahasa Banjar yang merupakan singkatan dari badapatan manyambung silaturahmi yang artinya saling bertemu guna menyambung dari tali silaturahmi. Bamara adalah kegiatan yang diadakan

oleh humas Pemerintah Kota Banjarmasin dengan mendatangkan seorang bagian dari pimpinan daerah atau kota, seperti Kepala Daerah, Wakil Walikota dan lain-lain. Untuk dipertemukan dengan wakil dari masyarakat baik itu dari suatu organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun seorang dosen dari sebuah universitas untuk membahas atau merundingkan tema-tema atau topik-topik yang lagi hangat, contohnya seperti pemindahan Ibu kota. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan para pemimpin.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gusti Wira Kesuma dalam wawancara yang dilakukan di humas Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu:

Kegiatannya dibidang informasi publik dan sebagian kegiatannya monitoring publik. Bamara itu setahun bisa diadakan dua atau tiga kali, artinya bamara itu penyambung silaturahmi. Tujuan diadakannya bamara ialah sebagai penyambung silaturahmi. Yang diundang adalah tokoh-tokoh lsm atau tokoh-tokoh kita kan banyak. Nanti misal waktu kegiatan hijau, kan lsm macam-macam, ada anak pecinta pohon, nama-nama organisasi yang Banjarmasin itu dikumpulkan jadi satu. Jadi satu didalam suatu bamara itu, yang dibahas adalah tema-tema atau topik-topik yang lagi trending. Contohnya di bulan february mengadakan bamara itu membahas tentang pemindahan ibu kota ke Banjarbaru. Intinya yang dibahas adalah topik yang lagi trending di Banjarmasin. Yang penting di bamara itu yang dibahas ialah topik yang lagi trending. Dan narasumbernya kadang Dosen Unlam, Dosen UIN. Bamara ini diadakan

biasanya 2 bulan sekali. Bamara ini menyampaikan aspirasi atau keluhan langsung dihadapan walikota. Tapi yang aspirasi atau keluhan yang disampaikan harus sesuai dengan topik yang lagi dibahas atau sesuai temanya.

Humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga selalu berusaha untuk menyampaikan berita secara *up to date* (terkini) dan disebarakan secepat mungkin, agar masyarakat dengan cepat mengetahui serta tidak tertinggal dengan kejadian apa saja yang terjadi di Kota Banjarmasin. Selain itu, dalam suatu kejadian yang akan dimuat dalam berita, pasti ada ditemukan satu atau beberapa topik yang terlalu tajam atau berkemungkinan akan menyinggung, memermalukan seseorang atau sesuatu. Jadi dalam pengemasan berita tersebut, humas Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengimbangan terhadap berita tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

Hal yang disebutkan diatas berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Rahmanata, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Menaikkan citra itu biasanya kami selalu *up to date*, tentang berita apa yang lagi viral, khususnya yang diwilayah Pemerintah Kota Banjarmasin, terkait masyarakatnya maupun sebuah instansi dari kepegawaian, ataupun pimpinan, yakni: Walikota, Wakil Walikota atau Skpd lainnya. Maka dari itu untuk menaikkan citra kami *up to date* berita tersebut, jika berita tersebut terlalu tajam, contohnya seperti berita yang akhir-akhir ini kan ada Satpol pp yang merajia

rumah makan nonhalal, nah itu kan citra nya itu bagaimana antara citra pemimpin itu tidak dipermalukan oleh Skpdnya, contohnya tadi dari satuan kerja Satpol pp itu maka peran humas yakni: membuat sebuah video jumpa pers dengan para wartawan untuk mengimbangi berita tersebut, agar citra dari Pemerintah Kota Banjarmasin, itu tidak terlalu buruk.

## **(2) Pendekatan yang dilakukan humas dalam meningkatkan citra pemerintah**

Kerjasama merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu instansi atau lembaga dalam mencapai tujuannya, tidak terkecuali untuk humas Pemerintah Kota Banjarmasin. Tentu kerjasama antar pegawai humas sangat diperlukan baik itu dalam pembagian tugas dan lain-lain, tapi selain kerjasama antar pegawai instansi atau lembaga tersebut juga harus bekerja sama dengan instansi atau lembaga lainnya. Seperti humas Pemerintah Kota Banjarmasin yang bekerja sama dengan media. Agar terciptanya jalinan komunikasi yang baik dalam menyebarkan informasi tentang Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdi Dian Wahyudillah, menyatakan:

Kalau dibidang komunikasi kita pelayanan untuk liputan internal maupun eksternal. Jadi seluruh kegiatan internal Pemerintah Kota Banjarmasin pun kegiatan luar yang dihadiri oleh pimpinan itu kadang kita liput dan pemberitaannya pun kita rilis di media internal maupun media pihak ketiga yang bekerja sama dengan humas Pemerintah Kota Banjarmasin, jadi pihak ketiga

itu, juga seluruh media cetak, media elektronik, media online, ada pihak ketiga, dan kita punya tangan sendiri, itu media center dan berita Banjarmasin untuk media internal.

### **(3) Media yang digunakan humas untuk meningkatkan citra Pemerintah Kota Banjarmasin**

Dengan perkembangan teknologi tentu penyebarluasan berita juga mengikuti perkembangan zaman, dari yang awalnya melalui media cetak dan media elektronik seperti radio dan televisi sekarang sudah diperluas dengan adanya platform-platform yang ada di sosial media. Adapun media yang digunakan humas Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

#### **(a) Media cetak**

Media cetak yang dimaksud disini adalah sarana komunikasi penyampaian informasi dengan cara dicetak. Adapun media cetak yang digunakan oleh humas Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyampaikan informasi diantaranya: Koran dan Baliho atau spanduk

#### **(b) Media Elektronik**

Media elektronik adalah alat penyampaian pesan dari sumber kepada masyarakat. Media elektronik lebih banyak digunakan oleh lembaga

atau instansi dikarenakan penyampaian dapat diterima dengan mudah dan cepat.

Adapun media elektronik yang digunakan oleh humas dalam menyampaikan informasi mengenai Pemerintah Kota Banjarmasin, antara lain: Radio dan Televisi

### **(c) Media Online/Internet**

Humas Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki website resmi yaitu [banjarmasinkota.go.id](http://banjarmasinkota.go.id) yang berisikan berbagai informasi dan layanan publik. Yang dimana tujuan dari situs ini adalah memberikan informasi dengan cepat dan akses yang mudah. Dan ini tentu akan meningkatkan citra Pemerintah Kota Banjarmasin di mata masyarakat

Selain itu, humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki akun resmi di media sosial:

- 1 facebook : [Facebook.com/pemkobanjarmasin](https://www.facebook.com/pemkobanjarmasin)
- 2 Instagram : [Instagram.com/pemko\\_banjarmasin](https://www.instagram.com/pemko_banjarmasin)
- 3 twitter : [Twitter.com/humas\\_setdabjm](https://twitter.com/humas_setdabjm)
- 4 tiktok : [Tiktok.com/pemko\\_banjarmasin](https://www.tiktok.com/pemko_banjarmasin)

Rencana Strategi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan (2021-2026), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Hal yang disebutkan diatas berdasar pada hasil wawancara dengan Ibu Maulida Fatmawati, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Perencanaan Humas Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai strategi 5 tahun sekali. Disitu memuat program dan kegiatan mereka, misalnya dalam 5 tahun ini mereka mau mengadakan program apa, kegiatan apa dan dibutuhkan berapa, indikatornya apa ada direncana strategi itu. Kalau untuk bidang kehumasan, kami rutin terkait konten, media cetak, media elektronik, menyebarkan informasi publik, sosialisasi informasi publik. Tapi nanti asa rencana pengadaan terkait informasi ada videotron, koran, majalah, website sosial media, meliput, dan lain-lain.

Faktor Pendukung dan Penghambat Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Strategi Komunikasinya

### **1) Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang ada di Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Abdi Wahyudillah, menyatakan bahwa:

Faktor pendukung yang ada di Humas Pemerintah Kota Banjarmasin ini adalah para staf sudah cukup baik dalam melakukan penerapan strategi komunikasinya. Di Humas Pemerintah Kota Banjarmasin sekarang ini juga banyak

mempunyai kegiatan yang dinamakan Bamara (Badapatan atau menyambung silaturahmi). Berkala, kadang dilakukan dua bulan sekali. Jadi seluruh Skpd, dan kepala daerah, walikota, wakil sekda, itu pendapatan masyarakat, disitu ada strategi untuk mensosialisasikan berbagai program Pemerintah Kota Banjarmasin, selain itu juga Pemerintah Kota Banjarmasin di website media center maupun di website berita Banjarmasin, itu juga berkala kita memberikan publikasi ke masyarakat. Agar hubungan dengan Kota Banjarmasin dengan humas Kota Banjarmasin selalu terbuka, dan komunikasinya berjalan dengan lancar, baik itu media sosial maupun yang langsung bertatap muka tak masalah. Apalagi Bapak Walikota sekarang beliau memberikan komunikasi terbuka, jadi tidak perlu birokrasi. Pak Walikota bila ada pengaduan atau misal apa langsung menghubungi ke Pak Walikota, itu tidak masalah. Beliau langsung menindak lanjuti ke SKPD terkait.

## **2) Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang ada di Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmanata, menyatakan bahwa:

Dalam suatu proses komunikasi, faktor penghambat di humas Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan hal yang mungkin saja terjadi, terlebih disini biasanya ada dua, di *outdoor* ataupun *indoor*. Indoor ini biasanya di kantor, *outdoor*, masalah dilapangan. Untuk masalah di kantor, kadang itu masalah keterlambatan untuk pegawai itu mempengaruhi kinerja pegawai dilapangan. Dan untuk hambatan pegawai dilapangan biasanya tergantung dari acara tersebut. Apabila acara tersebut protokol nya terlalu ketat maka susah untuk mengambil foto maupun mendekati sesuatu hal yang untuk dikorek, informasinya itu susah. Banyak pengaruh-pengaruh yang lain seperti, mood ataupun cuaca, dan keterbatasan tenaga kerja yang dilapangan. Padahal kita tidak tau situasi apa yang akan terjadi dilapangan itu di satu menit kedepan ini. Itulah yang terjadinya kurangnya antar strategi komunikasinya.

**b) Tugas Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Bidang  
*e-Government***

Pasal 15

(1) Bidang layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *e-Government* dan tata kelola *e-Government*.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan ekosistem *e-Government*;
- b. Menyusun program, mengkoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan ekosistem *e-Government*;
- c. Menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
- d. Menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan tata kelola *e-Government*;

- e. menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah kota dan masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Unsur-unsur Bidang Layanan *e-Government* terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*; dan
- c. Seksi Tata Kelola *e-Government*.

#### Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan pengendalian pengembangan aplikasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan aplikasi;

- c. Menyiapkan bahan, pengawasan, pengendalian operasional layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- e. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dalam pengelolaan aplikasi;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pengembangan aplikasi;
- h. Menyusun, mengatur, mengelola dan mengevaluasi hasil pengembangan aplikasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 17

(1) Seksi pengembangan Ekosistem *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, supervisi, evaluasi pengembangan ekosistem *e-Government*.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan pengembangan ekosistem *e-Government*;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekosistem *e-Government*;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan ekosistem *e-Government*;
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
- e. Menyelenggarakan layanan sistem informasi *Smart City*;
- f. Menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *Smart City*;
- h. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;

- i. Menyelenggarakan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain portal dan website;
- k. Menyelenggarakan penetapan tata kelola nama domain sub domain; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan 1 apa saja keuntungan dan kerugian dalam Bidang Layanan *e-Government*, dan jawaban tersebut adalah

Keuntungannya banyak sih, karena lebih simpel, dan memudahkan kita untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat. Karena sekarang ini sudah mulai ke ranah digital, jadi dalam waktu dekat ini mungkin sekitar pertengahan tahun, nanti ada rilis ke Banjarmasin pintar-bapintar. Jadi di website itu akan ada 1 website integrasi, seluruh Skpd, seluruh dinas-dinas di Pemerintah Kota Banjarmasin akan jadi 1 aplikasi di kenal tersebut. Jadi itu Banjarmasin pintar-bapintar, disitu akan terinsgarasi dinas di Kota Banjarmasin.”

Kerugiannya mungkin kita memandangnya bukan sebuah kerugian tetapi sebuah tantangan, karena tidak semua orang masyarakat Kota Banjarmasin itu melek internet, itu yang jadi tantangan kita baik itu nanti sosialisasinya ditingkat Kecamatan, maupun ditingkat kelurahan, itu yang nanti akan ada untuk meratakan pelayanan berbasis internet, berbasis iga permen, supaya bisa menjangkau seluruh masyarakat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan oleh penulis diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh humas Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik.

Dimulai dari kegiatan bamara. Kegiatan bamara yang dilaksanakan oleh humas Pemerintah Kota Banjarmasin ini penulis beranggapan, dengan mengadakan kegiatan ini citra dari Pemerintah Kota Banjarmasin akan meningkat. Karena masyarakat pasti merasa senang dengan disiapkannya tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasinya langsung dihadapan pemimpin. Dan berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Gusti Wira Kesuma, kegiatan bamara ini sudah sering dilakukan. Contohnya pada Bulan Desember 2021 diadakan bamara untuk membahas masalah banjir. Dan dimulai dari Tahun 2022, kegiatan bamara diadakan 2x dalam sebulan.

Kemudian terkait dengan bagaimana penyampaian informasi yang disampaikan oleh humas kepada masyarakat. Humas Pemerintah Kota Banjarmasin selalu berusaha menyampaikan berita secara terkini dan sehati-hati mungkin. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmanata, yang dimana beliau menyebutkan bahwa humas Pemerintah Kota Banjarmasin selalu menyampaikan berita secara terkini (*up to date*) dan juga menimbang informasi tersebut sebelum disebarkan guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, contohnya terkait dengan informasi atau berita yang bersifat tajam yang berkemungkinan akan menyinggung pihak lain.

Selanjutnya, tentang metode pendekatan kerjasama humas Pemerintah Kota

Banjarmasin. Humas Pemerintah Kota Banjarmasin sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak media, baik itu media cetak maupun elektronik seperti TVRI Kalimantan Selatan, radio RRI, Koran Banjarmasin Post dan lain-lain. Pihak humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti instagram, facebook, youtube dan lain-lain.

Jadi dari pemaparan beliau, maka penulis menganalisis tentang metode pendekatan kerjasama humas Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut. Menurut yang dilihat dan diteliti memang sudah berjalan sesuai dengan yang dipaparkan. Maka peneliti berasumsi bahwa humas Pemerintah Kota Banjarmasin telah menjalankan fungsinya dengan semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, humas Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan Media Massa guna mendukung penyebaran informasi yang ingin mereka publikasikan. Menurut hasil analisis penulis, humas Pemerintah Kota Banjarmasin telah memanfaatkan media tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang penulis paparkan dibawah ini:

## **1. Media cetak**

### **a. Koran**

Humas Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan beberapa penerbit koran, antara lain: Banjarmasin Post, Kalimantan Post, KalSel Post, Radar Banjarmasin, Mata Benua dan Barito Post. Contohnya berita yang ada di koran terbitan Banjarmasin Post tanggal

19 Juni 2022 tentang penundaan penertiban pasar buah oleh pemerintah kota.



Sumber: <http://epaper.banjarmasinpost.co.id/>

#### **b. Baliho**

Selain koran, Humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga menggunakan baliho sebagai sarana penyampaian informasi mereka. Contohnya baliho yang terletak di jalan A. Yani km. 5 yang berisi tentang himbauan untuk ikut bayar pajak guna membangun Kota Banjarmasin.



Sumber: Baliho di Jalan A Yani Km 5,7



### 3. Sosial media

#### a. Facebook

Humas sangat aktif dalam penyebaran berita lewat akun facebooknya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berita yang bisa mereka posting. Dalam sehari mereka bisa saja memposting 2-3 berita dalam sehari.



#### b. Instagram

Sama seperti facebook, humas juga sangat aktif dalam penyebaran berita lewat akun instagramnya. Untuk berita yang diposting itu sama dengan apa yang diposting di akun facebook.



Sumber:

[https://instagram.com/pemko\\_banjarmasin?igshid=YmMyMTA2M2Y](https://instagram.com/pemko_banjarmasin?igshid=YmMyMTA2M2Y)

### c. Tiktok

Untuk akun humas Pemerintah Kota Banjarmasin ini baru saja dibuat pada tanggal 10 maret 2022. Tidak seperti instagram dan facebook, untuk akun tiktok ini tergolong jarang dalam memposting berita di akun tiktoknya. Hal ini dapat dilihat dari awal akun dibuat sampai sekarang, baru ada 3 postingan yang ada.



Selain media massa yang disebutkan diatas, humas Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki sebuah website, yang bernama [banjarmasinkota.go.id](http://banjarmasinkota.go.id). Salah satu kegunaan dari website ini adalah memberikan layanan publik secara online kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya layanan yang terdapat di dalam website tersebut. Tetapi khusus untuk humas Pemerintah Kota Banjarmasin hanya melayani dalam informasi dan komunikasi publik di dalam website tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Abdi Wahyudillah mengenai *e-Government* ini, penulis berpendapat bahwa banyaknya tugas-tugas humas dalam Bidang Layanan *e-Government*, dan sekarang ini Humas Pemerintah Kota Banjarmasin mulai berkembang dalam keuntungan di bidang Layanan *e-Government* tersebut.